

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang mempunyai budaya yang tinggi dan fundamental, hal ini dapat dilihat dari setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia diatur oleh norma yang berlaku di dalam masyarakat, salah satu norma yang membatasi yaitu norma hukum pidana yang mengatur mengenai larangan-larangan dan keharusan yang dikaitkan dengan sanksi pidana (hukuman) yang bersifat penderitaan.¹

Kedudukan hukum di dalam masyarakat sangat penting, hal ini dapat dilihat fungsi umum dari hukum, yaitu sebagai alat yang mengatur masyarakat dalam menyelenggarakan tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya hukum diartikan sebagai keseluruhan atau kaedah dalam kehidupan bersama, yang dapat dilaksanakan pelaksanaannya dengan memberikan sanksi.² Dalam Pasal 10 KUHP dikenal dengan 2 (dua) jenis sanksi pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, yang mana pidana penjara termasuk dalam pidana pokok. Penjatuan pidana bagi pelaku tindak pidana bukanlah semata-mata sebagai

¹P.A.F. Lamintang, *dasar-Dasar hukum Pidana Indonesia*, Citra aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 2.

²Galih Dewi Istanto, *Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Yang Menjalani Pembebasan Bersyarat*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus, 2011, hlm. 2.

pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan narapidana, namun lebih pada pemberian bimbingan.

Narapidana yang sedang menjalani masa hukumannya (pidana pokok) tetap mempunyai hak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (selanjutnya ditulis UU Pemasyarakatan), yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan cuti bersyarat; dan
- n. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Salah satu hak Narapidana yang diatur Pasal 14 angka 1 UU Pemasyarakatan sebagaimana tersebut di atas adalah hak mendapatkan Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan hak Cuti Bersyarat (CB). Hak tersebut diselenggarakan dalam rangka untuk mewujudkan sistem pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan. Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat merupakan bagian dari hak klien pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 angka 9 UU

Pemasyarakatan Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas. Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB) merupakan cuti yang diberikan setelah klien pemasyarakatan menjalani lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dengan ketentuan selama menjalani masa pidananya berkelakuan baik dan jangka waktu cutinya sama dengan besar remisi terakhir dan paling lama 6 (enam) bulan. Berdasarkan Pasal 14 angka 1 huruf l sebagaimana tersebut di atas, maka bagi klien pemasyarakatan yang telah menjalani 2/3 dari masa pidana dapat mengajukan Cuti Menjelang Bebas (CMB), tetapi dengan catatan selama menjalani masa pidananya klien pemasyarakatan berkelakuan baik.

Klien pemasyarakatan juga manusia, keberadaannya harus dianggap ada, klien pemasyarakatan harus dibimbing dengan tujuan setelah klien pemasyarakatan dibimbing setelah bebas nanti dapat mandiri dan menjadi manusia yang dapat menciptakan karya ditengah-tengah masyarakat. Klien pemasyarakatan meskipun belum bebas sepenuhnya tetap mempunyai hak yang harus dihormati. Lembaga yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk membimbing klien pemasyarakatan yaitu Balai Pemasyarakatan (Bapas). Bapas merupakan bagian dari pelaksana sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk melakukan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan dapat menjadi manusia yang lebih baik dan yang terpenting tidak melakukan perbuatan pidana lagi dan dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Dalam membimbing klien pemasyarakatan peran Bapas sangat penting dan diperlukan. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Bapas mempunyai tugas serta fungsi sebagai penyelenggara sebagian tugas pokok Direktorat Jendral Pemasyarakatan, yaitu melakukan kegiatan membimbing klien pemasyarakatan. Bimbingan yang diberikan Bapas kepada klien pemasyarakatan bermacam-macam bentuknya, yaitu bimbingan keagamaan, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan oleh Bapas kepada klien pemasyarakatan tujuannya adalah supaya klien pemasyarakatan dapat hidup dengan baik ditengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa pembedaan, selain itu Bapas juga memberikan motivasi kepada klien pemasyarakatan dengan harapan klien pemasyarakatan dapat memperbaiki dirinya dan yang paling penting tidak mengulangi tindak pidana dikemudian hari.³

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) juga mempunyai peranan yang penting dalam memberikan bimbingan terhadap Narapidana yang mendapatkan Cuti Menjelang Bebas (CMB), Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dengan melakukan pengawasan secara khusus terhadap Narapidana tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang

³Nika Stiyaningrum, *Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi Pada Bapas Kota Makassar)*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, 2016, hlm. 7.

menyatakan bahwa bimbingan dan pengawasan Klien dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS.

Data yang masuk ke Balai Pemasyarakatan Pati sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1
Jumlah Narapidana Dewasa yang dilakukan Penelitian
Oleh Balai Pemasyarakatan Pati
Pembimbingan Bulan Juni-Desember

No.	Program	Jumlah
1	Cuti Menjelang Bebas (CMB)	2
2	Cuti Bersyarat (CB)	141
3	Pembebasan Bersyarat (PB)	415
4	Asimilasi	0
5	Pidana Bersyarat	1
Jumlah		559

Sumber: Data dari Balai Pemasyarakatan Pati pada bulan Juni Tahun 2019
Jumlah secara keseluruhan narapidana yaitu 559 orang

Berdasarkan tabel 1 sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah Narapidana yang ikut program untuk CB ada 141 orang dan CMB ada 2 orang. Dalam hal ini jumlah Klien Pemasyarakatan secara keseluruhan sebanyak 559 orang, selebihnya tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh BAPAS. Ada beberapa beberapa faktor yang melatarbelakangi Narapidana tidak ikut program CB dan CMB, salah satu faktornya dikarenakan Klien Pemasyarakatan lebih banyak yang memilih untuk mengambil Pembebasan Bersyarat.

Cuti Menjelang Bebas sebagaimana diatur Pasal 102 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat (selanjutnya ditulis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018), dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi :

- a. Telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; dan
- b. Berkelakuan Baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebagaimana diatur Pasal 102 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018, yaitu lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan.

Pemberian Cuti Menjelang Bebas secara umum diatur Pasal 106 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa :

- (1) Pemberian Cuti Menjelang Bebas dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan.
- (2) Sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.

Cuti Bersyarat sebagaimana diatur Pasal 114 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018, dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- b. Telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana; dan
- c. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

Lamanya Cuti Bersyarat adalah 6 (enam) bulan sebagaimana diatur Pasal 114 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata untuk balas dendam, namun yang paling penting adalah memberikan bimbingan dan pengayoman kepada klien pemasyarakatan dengan tujuan setelah bebas menjadi manusia baik dan insyaf sehingga dapat diterima ditengah-tengah masyarakat. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sebagai ujung tombak untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas, hal ini karena Balai Pemasyarakatan berperan pada saat proses integrasi sosial dilaksanakan yaitu bagaimana Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dapat menuntun, menghantar dan mengarahkan klien pemasyarakatan kembali pada lingkungan masyarakat dimana klien pemasyarakatan tinggal dengan baik dan sehat.

Peran Bapas dalam membimbing klien pemasyarakatan cukup penting, karena Balai Pemasyarakatan menyiapkan klien pemasyarakatan untuk dibimbing ke jalan yang benar dengan harapan klien pemasyarakatan setelah menjalani masa pidananya menjadi manusia yang baik dan dapat membaaur dengan masyarakat lainnya sehingga dapat menjalani kehidupan yang normal dan yang terpenting dapat diterima kembali oleh masyarakat dilingkungan tempat tinggalnya.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pati merupakan Unit Pelaksanaan Teknis dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia secara teknis berada dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan secara administratif substantif berada langsung dibawah Kantor Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Bapas kelas II Pati melakukan kegiatan membimbing klien pemasyarakatan yang mendapatkan Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB).

Peraturan perundang-undangan yang mengatur Cuti Bersyarat (CB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) yaitu Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, sedangkan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disebut PP Nomor 31 Tahun 1999). Tahapan mengenai pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan diatur Pasal 40 PP Nomor 31 Tahun 1999.

Pelaksanaan pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan pada tahap awal Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menerima klien baru melakukan pentahapan, yang meliputi data diri Klien Pemasyarakatan memfoto klien untuk di masukkan kedalam data base, mengambil sidik jari, memberikan kartu lapor

diri, melakukan *assessment*, membuat case plane (rencana bimbingan / agenda untuk melakukan pembimbingan) dan menghitung tanggal pentahapan.⁴

Tahap lanjutan PK melakukan kunjungan dan pembimbingan kerumah klien, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah setempat, tempat pendidikan, dan tempat pekerjaan dalam rangka mengetahui hasil pembimbingan dalam tahap awal PK membuat Litmas tahap lanjutan untuk di presentasikan disidang TPP (mendapatkan rekomendasi saran program pembimbingan) dengan berdasarkan hasil evaluasi program pembimbingan tahap awal, apabila program bimbingan tahap awal masih di jalankan oleh klien dengan baik, maka dalam tahap lanjutan tetap dipertahankan atau di tingkatkan dengan program bimbingan yang baru, namun apabila program bimbingan gagal dalam tahap awal maka perlu di tingkatkan dengan kerjasama dengan berbagai pihak (tokoh masyarakat, tokoh agama, anggota keluarga, tempat bekerja, tempat sekolah, teman bergaul, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.⁵

Tugas BAPAS Kelas II Pati dalam melakukan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan tidak semudah membalikan telapak tangan, hambatan dan kendala pasti ada terutama kendala pada saat bimbingan di lapangan atau di dalam lingkungan masyarakat. Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian skripsi dengan judul

⁴ Nyamat, *Wawancara Pribadi*, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Pati , Prasurvey, tanggal 4 November 2019.

⁵ Nyamat, *Wawancara Pribadi*, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Pati , Prasurvey, tanggal 4 November 2019.

PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN YANG MENDAPAT CUTI MENJELANG BEBAS (CMB) DAN CUTI BERSYARAT (CB) OLEH BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PATI.

B. Perumusan masalah

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan yang mendapatkan Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pati?
2. Apa saja kendala yang muncul dalam melakukan pembimbingan terhadap bagi klien pemasyarakatan yang mendapat Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB) di Bapas Kelas II Pati ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan Bapas Kelas II Pati terhadap bagi klien pemasyarakatan yang mendapat Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB).
2. Untuk menjelaskan kendala yang muncul dalam melakukan pembimbingan terhadap bagi klien pemasyarakatan yang mendapat Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB) di Bapas Kelas II Pati

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini ada 2 (dua) kegunaan yang hendak di capai, secara teoritis dan secara praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan sumbangan bagi akademisi dalam mengembangkan dibidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana mengenai pelaksanaan pembimbingan terhadap klien pemsyarakatan yang mendapat Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB) oleh Balai Pemsyarakatan kelas II Pati.

2. Secara Praktis

Secara praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan informasi khususnya bagi praktisi hukum dan masyarakat mengenai pelaksanaan pembimbingan terhadap klien pemsyarakatan yang mendapat Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB) oleh balai pemsyarakatan kelas II Pati.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan, dari kelima bab tersebut, setiap bab akan membahas sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, akan menguraikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam tinjauan pustaka ini akan membahas mengenai Tinjauan Umum Tentang Pembimbingan, Pengertian Bimbingan, Bimbingan Klien Pemasarakatan, Pembimbingan dalam Masa Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (BAPAS kelas II Pati), Tinjauan Umum Tentang Sistem Pemasarakatan, Pengertian Sistem Pemasarakatan, Metode/Tahapan Dalam Proses Pemasarakatan, Tinjauan Umum Tentang Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas, Pengertian Cuti menjelang Bebas, Syarat Cuti Menjelang Bebas (CMB), Tata Cara Pemberian Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, Pengertian Cuti Bersyarat, Syarat Pemberian Cuti Bersyarat, Tata Cara Pemberian Cuti Bersyarat, Tinjauan Umum Tentang Balai Pemasarakatan, Pengertian Balai Pemasarakatan, Program Pembimbingan di Balai Pemasarakatan dan Tugas Balai Pemasarakatan.

BAB III Metode Penelitian, akan membahas Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan dan Penyajian Data dan Metode Analisa Data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, akan membahas mengenai pelaksanaan pembimbingan terhadap klien pemasarakatan Bapas Kelas II Pati terhadap bagi klien pemasarakatan yang mendapat Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB) dan menjelaskan kendala yang muncul dalam melakukan pembimbingan terhadap bagi klien pemasarakatan yang mendapat Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB) di Bapas Kelas II Pati.

Bab V Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran dari hasil pembahasan.

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

